

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PSAP NO. 01 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Aldhilla Dhea Ananda
aldhilladheaananda@gmail.com

Oryza Ardhiarisca
oryza_risca@polije.ac.id

Abstract

Every local government has an obligation to prepare and present local government financial reports, including the Regional Government of Lamongan City. This is a form of public accountability for the Regional Government of Lamongan City. In the financial statements of the local government, it can be seen the financial position of a local government. Prepared financial reports must be based on established standards. The purpose of this study is to determine the suitability of the financial statements that have been prepared by the local government of the city of Lamongan with the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 01. This research is qualitative research with comparative analytical techniques. This study gave the result that the Financial Statements prepared by the Regional Government of Lamongan City were in accordance with PSAP No. 01.

Keywords: *Local Government Financial Statement, Statement of Government Accounting Standards, Government of Lamongan City*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sistem hukum dalam mengatur pemerintahan. Raharjo (2018) menyebutkan bahwa sistem hukum didefinisikan sebagai tatanan hukum yang memiliki beberapa sub sistem hukum serta terdapat fungsi yang berbeda-beda. Pada pemerintahan sangat membutuhkan adanya hukum ataupun peraturan yang dapat dijadikan pedoman. Tata pemerintah yang baik dapat terwujud jika terdapat hukum (peraturan) pada bidang akuntansi pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada hasil informasi keuangan yang baik. Prinsip dalam pengelolaan keuangan pemerintah ada pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP ini menjadi pedoman dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal serta disajikan dengan akuntabel dan transparan.

Laporan keuangan pada sektor publik adalah suatu bentuk gambaran terstruktur yang menjelaskan posisi keuangan sebagai dampak dari transaksi yang dilakukan. Pelaporan keuangan pada sektor publik memiliki tujuan umum dalam memberikkan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, politik. Hal ini dapat menjadi bentuk

evaluasi kinerja manajerial dan organisasional dan juga bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan yang merupakan salah satu pengguna anggaran tentunya juga memiliki kewajiban dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAP juga dilandasi oleh adanya Peraturan Bupati Lamongan No. 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Tuntutan masyarakat dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel memberikan dampak terhadap meningkatnya peran akuntansi pada pemerintahan. Oleh karena itu dalam penyajian laporan keuangan harus didasarkan pada PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan. Melalui penganalisaan laporan keuangan dapat memberikan informasi kinerja keuangan pemerintah daerah apakah terjadi peningkatan ataupun penurunan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun berikutnya yang dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terkait penerapan PSAP No 1 pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan, terdapat hasil penelitian yang menunjukkan variasi hasil. Kema (2013) dan Niu et al., (2014) memberikan hasil bahwa laporan keuangan pemerintah daerah kota Manado dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotaboggu belum mengacu pada SAP dan PP No 71 Tahun 2010. Sedangkan penelitian yang dilakukan Shofia et al., (2020), Rahmadani, (2018), dan Fitriani, (2019) menyebutkan bahwa obyek penelitian telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAP No. 1. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum meratanya penggunaan atau penerapan PSAP di pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Lamongan agar diketahui kesesuaiannya

dengan PSAP No. 01. sehingga dapat menjadi perbaikan Pemerintah Kota Lamongan kedepannya.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stewardhsip

Teori Stewardship merupakan bagian dari Teori Agency. Donaldson dan Davis (1991) dalam Anton, (2010) menyebutkan bahwa Stewardship memberikan gambaran tentang para manajemen yang memiliki tujuan/sasaran yang berfokus terhadap kepentingan organisasi bukan pada tujuan individu. Teori ini menggunakan asumsi filosofi dari sifat manusia yang hakikatnya dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab, intergritas dan kejujuran terhadap pihak lainnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai *good governance*. Pemerintah / manajemen dalam hal ini merupakan *steward* yang mengelola keuangan untuk kesejahteraan masyarakat (*principals*). Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah diperolehnya kepada masyarakat. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan secara tepat (Nenabu, 2019).

Akuntansi pemerintah

Akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai aktivitas jasa untuk menyediakan suatu informasi kuantitatif seperti informasi keuangan entitas pemerintah. Informasi tersebut dijadikan dasar ataupun pijakan dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi pihak yang memiliki kepentingan (Halim, 2008). Tujuan dari akuntansi pemerintah tidak untuk mencari keuntungan melainkan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi pemerintah terdiri dari tiga ruang lingkup diantaranya struktur pemerintah, sumber daya, dan proses politik (Rachmat, 2010). Struktur pemerintah memiliki kaitan dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki pemerintah. Sumber daya dimanfaatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, baik itu yang berupa anggaran, pendapatan,

pembelanjaan dan biaya. Proses politik yang terjadi pada akuntansi pemerintah seperti adanya usulan dari presiden terkait perencanaan serta diperlukan persetujuan DPR dalam penetapan anggaran pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah

Keuangan pemerintah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hak serta kewajiban yang dapat dinilai dalam bentuk uang yang digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan (Rachmat, 2010). Laporan keuangan mendeskripsikan terkait posisi keuangan dalam periode tertentu (Harahap, 2008). Komponen laporan keuangan yang disajikan dalam Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Bastian (2010) menyebutkan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji permasalahan menggunakan metode kualitatif. Sugiyono, (2013) menyebutkan bahwa dalam penelitian ini memiliki landasan pospositivisme yang memiliki makna bahwa instrumen kunci dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi serta memiliki hasil yang lebih menekankan pada makna. Dalam penelitian memiliki fokus pada kesesuaian unsur yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PSAP No. 01.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, dimana pada data sekunder diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lamongan sedangkan data primer merupakan data hasil wawancara yang mendukung data utama hasil penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten lamongan tahun 2020. Unsur laporan keuangan yang akan disesuaikan dengan PSAP No. 01 yakni:

- a) Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya memiliki enam unsur yakni pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan
- b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan ini minimal menyajikan pos: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan lain-lain, serta saldo anggaran lebih akhir.
- c) Neraca menyajikan sembilan pos yakni kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas
- d) laporan operasional menyajikan lima pos yakni pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional (bila ada), pos luar biasa (bila ada), dan surplus/defisit-LO
- e) Laporan arus kas berisi tentang informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- f) Laporan perubahan ekuitas terdiri dari 4 pos yakni ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.
- g) Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan rinci terkait pos yang berada pada enam laporan yang telah disajikan.

Tahapan selanjutnya adalah mengecek kesesuaian atau kelengkapan antara isi dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten lamongan dengan PSAP No 1. Perhitungan kesesuaian adalah menggunakan persamaan sebagai berikut (Rahmadani, 2018):

$$\text{rata rata} = \frac{\sum X}{Y}$$

dimana

ΣX = Total kesesuaian

Y= Total komponen laporan keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata kesesuaian tersebut maka dilakukan pengukuran kesesuaian dengan menggunakan parameter sebagai berikut

Tabel 1 Parameter Kesesuaian

Nilai rata-rata (kesesuaian)	Keterangan
80-100	Sangat sesuai (SS)
50-80	Sesuai (S)
10-50	Cukup sesuai (CS)

Sumber: (Rahmadani, 2018)

Data dikumpulkan menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dimaknasi sebagai penganalisaan terhadap dokumen yang disusun oleh obyek. Sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang dapat mendukung hasil penelitian ini kepada narasumber. Informan yang akan dipilih yaitu Kepala Bidang Akuntansi, Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Verifikasi dan Subbidang Fasilitas dan Pembinaan

Analisis komparatif merupakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam analisis komparatif adalah dengan melakukan perbandingan terhadap penyajian komponen dan metode laporan keuangan yang disesuaikan dengan PSAP No. 01. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020. Sedangkan pada hasil wawancara menggunakan metode Milles dan Huberman untuk dilakukan reduksi kemudian menganalisis hasil temuan, memverifikasi dan interpretasi data dalam penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan merupakan instansi pemerintah yang juga memiliki keharusan menggunakan PSAP No. 01 sebagai acuan dalam penyusunan laporan

keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah serta dapat memberikan informasi yang andal dan relevan terkait posisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Dalam penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten Lamongan terdiri dari:

a) Laporan realisasi anggaran

Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.838.272.211.782,49; dengan Belanja sebesar Rp2.217.800.561.599,77; dan transfer sebesar Rp605.337.364.515,00; Hal ini berdampak terjadinya Surplus sebesar Rp15.134.285.677,72; Selanjutnya terdapat unsur, Pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp43.165.160.938,77 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.875.000,00 sehingga pembiayaan neto sebesar Rp36.290.160.938,77; Hal ini berdampak pada Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp51.424.446.616,49

b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL)

Pada akhir tahun 2020 terdapat saldo anggaran lebih sebesar Rp51.424.446.606,49. Hal ini diperoleh dari saldo anggaran lebih awal sebesar Rp. 30.172.246.506,77. dikurangi penggunaan SAL 30.127.893.188,77 dan koreksi penggunaan SILPA sebesar Rp44.353.318,00 ditambah dengan sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 51.424.446.606,49.

c) Neraca

Pada sisi aktiva di neraca berjumlah Rp5.414.658.472.857,71. Nilai tersebut berasal dari akumulasi kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, investasi jangka panjang dan aset tetap. Kewajiban pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 61.931.987.103,59 yang diperoleh dari akumulasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Selisih antara aktiva dan kewajiban menghasilkan nilai ekuitas sebesar Rp. 5.352.726.485.754,12

d) Laporan operasional

Jumlah pendapatan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.829.611.537.696,80 nilai ini diperoleh dari penjumlahan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah beban dan transfer adalah sebesar 2.785.534.913.221,96 sehingga terdapat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp. 44.076.624.474,84. Pada kegiatan non operasional terdapat surplus kegiatan non operasional sebesar Rp. 41.923.993.270,76. Sehingga pada Tahun 2020 mengalami Surplus sebesar Rp. 86.000.617.745,60

e) Laporan arus kas

Laporan arus kas pemerintah daerah kabupaten Lamongan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas pada tahun 2020. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah Rp. 339.730.416.501,13 jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah -Rp. 331.471.130.833,41 jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah Rp. 13.037.267.750,00 jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris adalah -Rp. 44.353.318,00 sehingga saldo akhir kas adalah sebesar Rp. 51.429.558.606,49 yang didapatkan dari jumlah saldo akhir kas di BUD, BLUD, BOS dan Bendahara Pengeluaran dan saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan.

f) Laporan perubahan ekuitas (LPE)

Ekuitas akhir pada pemerintah daerah kabupaten Lamongan Rp5.352.726.485.754,12. Nilai tersebut diperoleh dari Ekuitas awal sebesar Rp. 5.311.729.526.227,58 ditambah surplus dari Laporan Operasional (LO) Rp. 86.000.617.745,60. dan dikurangi dampak kumulatif perubahan Rp. 45.003.658.219,07 dan dikurangi koreksi-koreksi Rp. 70.468.277.450,71 dan ditambah penyesuaian nilai penyusutan aset tetap Rp. 25.464.619.231,64.

g) Catatan atas laporan keuangan

terdiri dari penjelasan naratif atau rincian angka yang tertera pada enam laporan lainnya.

Berdasarkan informasi di atas, selanjutnya disusun kesesuaian unsur dari Laporan Keuangan tersebut dengan PSAP No 01 seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kesesuaian Unsur Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan PSAP No. 01

No	Komponen Laporan Keuangan (Y)	Penerapan pada Pemerintah daerah kabupaten Lamongan	Kesesuaian unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan(X)
1	Laporan Realisasi Anggaran LRA	Unsur pada LRA telah sesuai dengan PSAP No. 01	100
2	Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	Unsur pada SAL telah sesuai dengan PSAP No. 01	100
3	Neraca	Unsur pada Neraca telah sesuai dengan PSAP No. 01	100
4	Laporan Operasional (LO)	Unsur pada LO telah sesuai dengan PSAP No. 01	100
5	Laporan Arus kas	Unsur pada Laporan arus kas telah sesuai dengan PSAP No.01	100
6	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Unsur pada LPE telah sesuai dengan PSAP No. 01	100
7	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Unsur pada CaLK telah sesuai dengan PSAP No. 01	100
Total kesesuaian			700

Berdasarkan data di atas, maka kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Pemerintah dapat dihitung sebagai berikut:

$$rata \quad rata = \frac{\sum X}{Y} = \frac{700}{7} = 100$$

Hal ini menunjukkan kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten Lamongan adalah 100%. Berdasarkan parameter pada tabel 1 menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut sangat sesuai dengan PSAP No. 1.

Penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan PSAP No 1. Hal ini dapat disebabkan oleh sumber daya manusia di pemerintah kabupaten

Lamongan yang telah mengikut sosialisasi dan pelatihan. Aditya et al., (2015) menyebutkan bahwa adanya pelatihan dapat meningkatkan kompetensi dari pegawai. Hal tersebut sesuai pernyataan Kepala Subbidang Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan :

“Untuk jumlah sumber daya manusia sudah memadai tetapi kualitas belum karna belum semuanya memahami penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.01 terlebih tidak semua sumber daya manusia disini memiliki latar belakang pendidikan ekonomi tetapi dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan tadi jadi mungkin bisa lebih membantu.”

Pendidikan merupakan aspek yang urgen dalam menunjang pekerjaan. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan salah satu cara termudah dalam menilai apakah seseorang layak untuk bekerja pada posisi tersebut atau tidak. Hal ini sesuai dengan Wirawan et al., (2019) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Pada bagian akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan tentu saja dibutuhkan keahlian dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, tidak semua pegawai pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi sehingga dibutuhkan pelatihan agar staf di bagian akuntansi mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP No. 01. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Subbidang Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan :

“tidak semua pegawai dibagian bidang akuntansi memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, akan tetapi kebanyakan berlatar belakang pendidikan ekonomi. Untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi biasanya adalah masalah spesifikasi khusus laporan yang dibuat”.

Pengalaman kerja memberikan indikator bahwa seberapa ahli seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Semakin lama seseorang bekerja maka dapat dinilai bahwa kemampuan dan ketepatan orang tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya semakin

meningkat. Wirawan (2019) menyebutkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Keseluruhan pegawai pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan keuangan telah bekerja dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Hal ini berdampak pada setiap pegawai sudah terbiasa dan mampu dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01. Selain pengalaman kerja yang lama, sosialisasi dan pelatihan juga sangat berdampak positif untuk penerapan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten lamongan telah menerapkan teori *stewardship*. Donaldson dan Davis (1991) dalam Anton (2010) menyebutkan bahwa teori *Stewardship* menjelaskan bahwa para manajemen termotivasi untuk mencapai kepentingan organisasi atau tujuan organisasi. Implementasi teori ini yakni bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lamongan diberikan wewenang dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mencapai kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan. Laporan tersebut juga merupakan media transparansi, media akuntabilitas publik, sarana informasi dan juga sebagai evaluasi kinerja.

SIMPULAN

Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan sangat sesuai dengan PSAP No 01. Hal ini dibuktikan oleh kesesuaian dan kelengkapan unsur Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan PSAP No. 01.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Utami, H. N., & Ruhana, I. (2015). Pengaruh pelatihan terhadap kompetensi dan kinerja karyawan. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume*, 27(2).
- Anton, F. X. (2010). Menuju teori stewardship manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2).
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Fitriani. (2019). PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 2(1), 112–125.
- Halim, A. (2008). Auditing (Dasar-dasar audit laporan keuangan). *UUP STIM*.
- Handri Raharjo, S. H. (2018). *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*. Media Pressindo.
- Harahap, S. S. (2008). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kema, I. (2013). Penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Nenabu, J. C. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kota Dan Kabupaten Se-Indonesia)*.
- Niu, F. A. L., Karamoy, H., & Tangkuman, S. (2014). Analisis Penerapan Pp. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4).
- Peraturan Bupati Lamongan No. 90 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Rachmat. (2010). *Akuntansi Pemerintah*. CV Pustaka Setia.
- Rahmadani, F. (2018). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang laporan keuangan pemerintahan pada Pemerintah Kota Subulussalam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Shofia, T. R., Mutmainah, S., & Nikmatuniayah, N. (2020). ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA UPTD PUSKESMAS GUNUNG PATI SEMARANG. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 3(2), 89–101.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Wirawan, K. E., Bagia, I. W., & Susila, G. P. A. J. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 5(1), 60–67.